

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat

Dini Arwati¹, Novita Hadiati²
^{1,2} Universitas Widyatama Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial dan simultan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskripsi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi dan studi Kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal secara parsial (uji t) dan secara simultan (Uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Kata kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja pada Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut

banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya dimana rata-rata belanja modal hanya mendapatkan persentase sebesar 12,8 % dari total PAD pada kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat tahun 2006.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

1.1. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008:1). Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto (BPS, 2008: 3). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS,2008:5) dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS,2008:8).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004 : 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: “Pendapatan asli daerah yaitu: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain PAD yang sah.”

Dana Alokasi Umum

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU 32/2004). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana hibah (*grants*) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum yaitu: “Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Dengan perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Modal

Menurut Abdul Halim (2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 1) Belanja Modal Tanah, 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 5) Belanja Modal Fisik Lainnya.”

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008: 1).

Hasil penelitian yang dilakukan Justin Yifu Lin & Zhiqiang Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Yifu Lin & Zhiqiang Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yuli Yustikasari (2006), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dan penelitian lain yang dilakukan Sukriy Abdullah dan Abdul Halim (2004), menunjukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

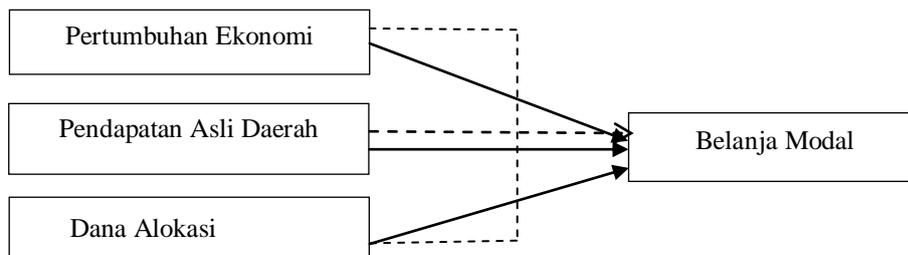
Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk

membayai kegiatannya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yuli Yustikasari (2006) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori, bukti empiris dan permasalahan yang terjadi, maka dapat dapat dikemukakan suatu jawaban yang bersifat sementara yaitu, sebagai berikut:

H₁: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

H₂: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 26 Kabupaten/Kota pada tahun 2008-2010. Berdasarkan kriteria yang dipakai sebagai sampel adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD secara konsisten dari tahun 2008-2010. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu sejumlah 15 kabupaten dan 8 kota.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder dengan mengolah data yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat berupa data kuantitatif, yaitu Data Laporan Realisasi Anggaran APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel bebas (*Independent Variabel*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dengan PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Variabel terikat (*Dependent variabel*) yang merupakan perhatian utama adalah Belanja Modal.

Metode Analisis Data Statistik

Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastis, otokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji secara simultan dan parsial.

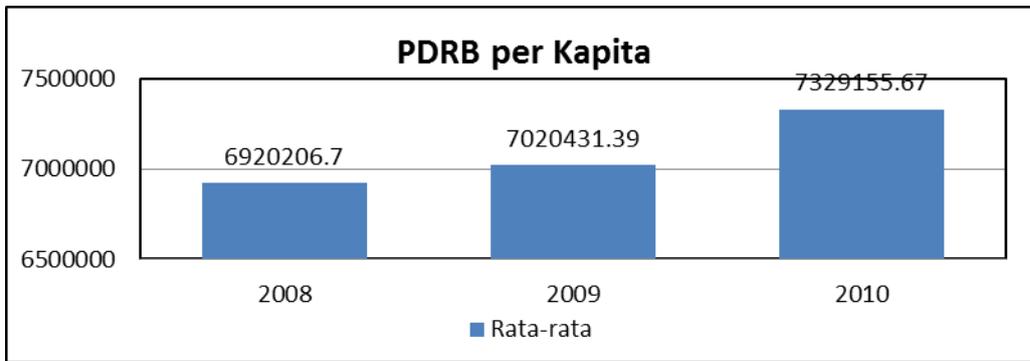
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini telah dilakukan oleh penulis tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010 sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

Secara visual rata-rata perkembangan PDRB per Kapita mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010 yang digambarkan dalam grafik berikut ini :

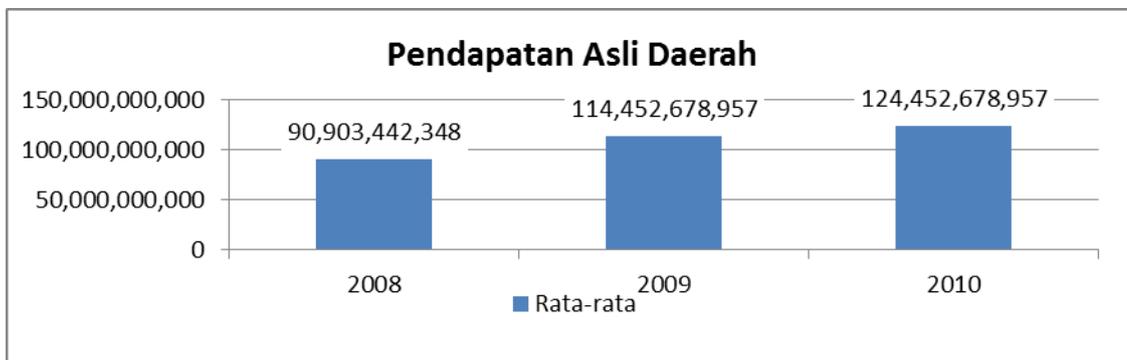


Sumber : BPS Jawa Barat 2008-2010

Gambar 4.1 Rata-rata Perolehan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB per Kapita) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara visual rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010 yang digambarkan dalam grafik berikut ini :

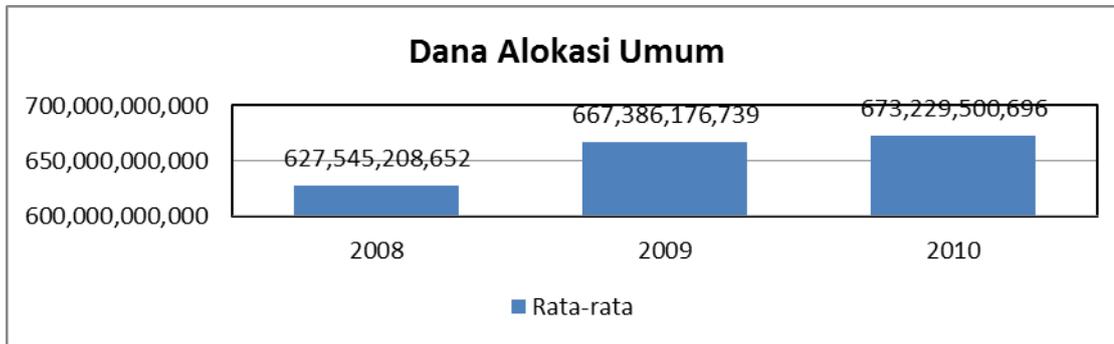


Sumber : BPS Jawa Barat 2008-2010

Gambar 4.2 Rata-rata Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010

Dana Alokasi Umum (DAU)

Secara visual rata-rata perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010 yang digambarkan dalam grafik berikut ini :

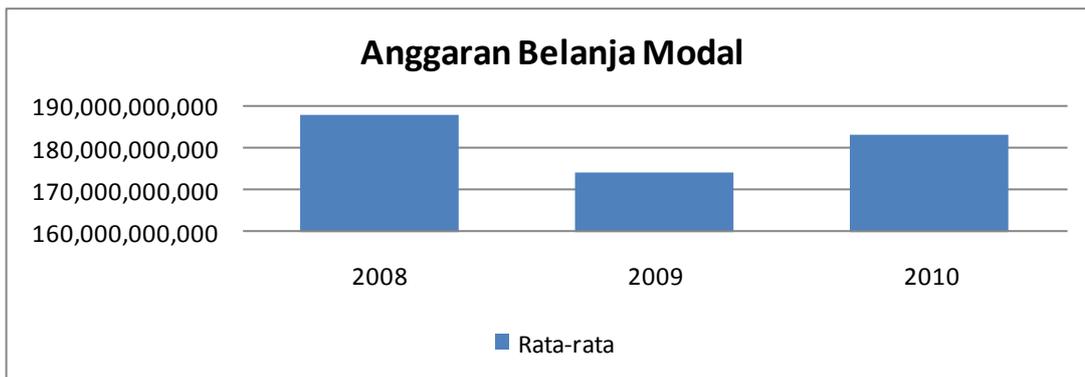


Sumber : BPS Jawa Barat 2008-2010

Gambar 4.3 Rata-rata Perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010

Anggaran Belanja Modal

Secara visual rata-rata perkembangan Anggaran Belanja Modal mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010 yang digambarkan dalam grafik berikut ini :



Sumber : BPS Jawa Barat 2008-2010

Gambar 4.4 Rata-rata Perolehan Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows ver. 19* diperoleh koefisien regresi seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.1: Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	36385.009	144818.548		.251	.804
Produk Domestik Regional Bruto	1168.967	1698.077	.091	.688	.500
Pendapatan Asli Daerah	1.260	.201	.838	6.266	.000
Dana Alokasi Umum	.020	.061	.039	.330	.745

Sumber : Output SPSS, 2012

Dari hasil output regresi tersebut diatas didapat persamaan regresi (dalam jutaan) sebagai berikut:

$$Y = 36385,009 + 1168,967X_1 + 1.260X_2 + 0.020X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut, menjelaskan bahwa:

- a. Pertumbuhan Ekonomi mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1168,967 artinya apabila terjadi perubahan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 % akan menaikkan Belanja Modal sebesar 1168.987 atau 116898,7%.

- b. Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1.260 artinya apabila terjadi perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 % akan menaikkan Belanja Modal sebesar 1.260 atau 126 %.
- c. Dana Alokasi Umum mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.020 artinya apabila terjadi perubahan variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0.020 atau 2%.

Koefisien Determinasi (R²)

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Regresi dengan lebih dari dua variabel independen atau bebas digunakan Adjusted sebagai koefisien determinasi. Hubungan korelasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2: Analisis Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898 ^a	.806	.775	161782.23498

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS, 2012

Nilai R-square (R²) atau koefisien determinasi model regresi diperoleh sebesar 0.806 menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Artinya bahwa variable Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mampu dijelaskan oleh variabel Belanja Modal sebesar 80,6 % sedangkan sebesar 19,4% lainnya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Uji Parsial (t-test)

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui keberartian hubungan atau pengaruh salah satu variabel bebas dengan tidak bebas dengan asumsi variabel lainnya konstan. Uji t dilihat dari tingkat signifikansi masing-masing variabel. Jika nilai sig dibawah 0,05, maka masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.3: Uji Parsial Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	T	Sig	Collinearity Statistics	
	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)		.251	.804		
Produk Domestik Regional Bruto	.091	.688	.500	.583	1.714
Pendapatan Asli Daerah	.838	6.266	.000	.570	1.754
Dana Alokasi Umum	.039	.330	.745	.714	1.400

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS, 2012

Berdasarkan tabel uji parsial dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut :

Pengujian pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sebesar 0,500. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho diterima dan kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dan hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel} (-2,093 < 0,688 < 2,093)$, sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho tidak ditolak yang berarti Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000. karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dan dari hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel} (6,266 > 2,093)$, sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang

berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara parsial

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,745. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H_0 tidak ditolak dan kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tingkat signifikansi adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan ($df = n - k - 1$) $df = 23 - 3 - 1 = 19$, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,093. Dengan bantuan software SPSS.19, seperti terlihat pada tabel 4.3 diperoleh nilai t_{hitung} variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,330. Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($-2,093 < 0,330 < 2,093$) sehingga pada tingkat kekeliruan 5% H_0 tidak ditolak yang berarti Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Uji Simultan (F-test)

Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS for Windows ver. 19.

Tabel 4.4: Uji Simultan ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	206 7E12	3	6.890E 11	26 .326	.000 ^a
Residual	4.97 3E11	19	2.617E 10		
Total	2.56 4E12	22			

a. Predictors: (Constant), Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS, 2012

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H_0 ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Lalu dilakukan pengujian dengan cara melihat dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan ($k; n - k - 1$) $df = 3; 19$. Pada tabel F untuk $df_1 = 3$, $df_2 = 19$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,13. Dengan bantuan software SPSS.19, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebesar 26,326. Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,326 > 3,13$), maka pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ketiga variabel bebas, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. tingkat signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.4.

4.2 Pembahasan

Secara parsial :

- Pertumbuhan Ekonomi secara statistik berpengaruh positif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal tetapi tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,583 ($\alpha = 5\%$). Dengan demikian H_a yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal tidak dapat diterima.
- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikansi 0,000 ($\alpha = 5\%$), demikian H_a yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- Dana Alokasi umum secara statistik tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi PAD sebesar 0,745 yang berada di atas 0,05. Dengan demikian H_a yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal tidak dapat diterima. Hal ini

mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

Secara simultan :

Secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan nilai signifikan 0,000. Hal tersebut berarti bahwa secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu Pertumbuhan Ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dalam APBD.

- Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda.
- Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.
- Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa hanya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 dan Pertumbuhan Ekonomi serta Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,00 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen tersebut (variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis, saran-saran yang ditunjukkan khususnya untuk para peneliti selanjutnya dan pembuat kebijakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

- Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada obyek lain yang lebih luas, sampel yang diambil lebih banyak tidak hanya pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat saja dan menambahkan periode tahun pada penelitian yang akan datang. Aspek kebijakan publik, aspek politik, dan aspek penganggaran daerah juga dapat menjadi variabel tambahan untuk diteliti dalam mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan.
- Bagi Pembuat Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Temuan-temuan dalam studi ini menunjukkan beberapa hal yang secara teoritis dapat dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih jauh, mengingat adanya beberapa faktor yang tidak dimasukkan didalam analisis (misalnya aspek psikologis dan personalitas pembuat keputusan di Pemda).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004, "Pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAU) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali" Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16 – 17 Oktober 2003, Surabaya, hal. 1140
- Abuyamin, Oyok, 2010, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Bandung, Penerbit Humaniora.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2008, *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2006-2008*, Bandung.
- Bernanda, Gatot Tri Bawono, 2008, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa barat dan Banten), Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Boediono, 2010, *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?*, *Kumpulan Esai Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta, KPG (Keputakaan Populer Gramedia)
- Darwanto dan Yustikasari, 2007, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", Simposium Nasional Akuntansi, Juli, Makasar.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariasi Dengan Program SPSS*, Edisi 4, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.

- Halim, Abdul, 2001, Anggaran Daerah dan "fiscal Stress" (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia),
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16(4), 346-357.
- , 2002, *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- , 2004, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda : Studi Kasus
Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali, Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- , 2007, *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta,
Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu, 2000, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and
Cultural Change*, Chicago, Vol 49. Hal : 1-21
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, *tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, *tentang Penerimaan Daerah*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, *tentang Dana Perimbangan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, *tentang Pengeolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY), JAAI Volume 8 No.2, Desember
2004.
- Sekaran, Uma, 1992, *Research Methods for Business : Skill Building Approach*, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc.
- Situngkir, Anggiat, 2009, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pengkab Sumatera Utara. Tesis, Medan, Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.
- Zulganef, 2008, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.